

Protes sosial digital dan perspektif *civic community*

Yayuk Hidayah^{1*)}, Sapriya¹, Cecep Darmawan¹, Elly Malihah¹

¹Universitas Pendidikan Indonesia

Jalan Setiabudi 229, Isola, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Email: yayukhidayah@upi.edu, Phone +6281278897089

How to Cite This Article: Hidayah, Y.,
Et All.(2020). Protes sosial digital dan
perspektif civic community. *Jurnal Studi
Komunikasi*, 4(1). doi:
10.25139/jsk.v4i1.1964.

Received: 23-09-2019,
Revision: 29-11-2019,
Acceptance: 15-01-2020,
Published online: 05-03-2020

English Title: Digital social protest and civic community perspective

Abstract *Academics tend to not pay adequate attention to the student's civic community, especially around its contribution to the formation of good citizens. Meanwhile, the era continues to evolve and civic student's civic continues to change by aiming to emphasise its function as a forum for coaching students to acquire or add skills outside the classroom. This research focused on social protests in digital political communication through civic community among students. The method used in this research was qualitative phenomenology. The findings in this study indicated that social protest in digital political communication through the civic community among student has various schemes. Social media, a medium of political communication expression, has a role in providing a place to be active as an individual.*

Keywords: *social protest; political communication; digital era*

Abstrak *Civic community pada mahasiswa belum mendapat perhatian yang intens dari akademisi, terutama seputar kontribusinya terhadap pembentukan warga negara yang baik. Pada sisi lain, era terus berkembang dan civic community pada mahasiswa terus berubah dengan mengarah pada penekanan fungsi sebagai wadah pembinaan mahasiswa untuk memperoleh atau menambah keterampilan di luar kelas. Riset ini berfokus pada protes sosial dalam komunikasi politik digital melalui civic community pada mahasiswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif fenomenologi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa protes sosial dalam komunikasi politik digital melalui civic community pada mahasiswa mempunyai berbagai skema. Media sosial sebagai tempat untuk mengekspresikan pesan-pesan politik memiliki andil dalam menyediakan tempat untuk menjadi aktif sebagai individu.*

Kata Kunci: *protes sosial; komunikasi politik; era digital*

^{*)} *Corresponding Author*

PENGANTAR

Titik temu antara konservatisme dan digitalisasi telah memunculkan banyak tanda yang mewarnai segala aspek kehidupan manusia di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Gelombang Revolusi Industri 4.0 mengubah ruang gerak manusia menjadi digital dan mempengaruhi unsur pelayanan publik (Prabowo & Irwansyah, 2018). Hadirnya Revolusi Industri 4.0 membawa beragam manfaat bagi ruang publik teknologi media sosial. Adapun beberapa manfaat media sosial antara lain untuk menjalin hubungan dengan orang lain, bekerja, mengakses berita, hingga menyalurkan aspirasi politik. Dalam beberapa tahun terakhir, di seluruh dunia telah muncul berbagai aksi menarik dan menyita perhatian yang muncul dalam platform digital. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial turut berperan sebagai alat dalam menyampaikan aspirasi politik, misalnya dalam fenomena aksi di Timur Tengah. Dalam revolusi Timur Tengah atau dikenal juga dengan fenomena "*Arab Spring*," kehadiran teknologi menjadi jembatan untuk menyampaikan ketidakpuasan rakyat atas rezim yang sedang berkuasa. Pada revolusi Timur Tengah, para aktor pro-demokrasi saling bertukar informasi dengan memanfaatkan ruang publik teknologi berupa media sosial; sehingga turut memunculkan protes pada rezim politik (Umar, Darmawan, Sufa, & Ndadari, 2016).

Salah satu efek dari penetrasi media sosial dalam kehidupan manusia adalah semakin meningkatnya kontestasi politik. Sebagai konsekuensi logis, kini bermunculan komunikasi yang deras di kanal media sosial, tidak terkecuali dalam komunikasi politik. Hadirnya tantangan dalam mengatasi masalah global juga menjadi inspirasi bagi generasi muda, yang telah lincah berselancar dalam komunikasi digital melalui platform media sosial, dalam menghadirkan solusi yang kreatif (Bennett, 2008). Media sosial telah menjadi salah satu pilihan dalam menyampaikan segenap aspirasi terhadap penguasa. Tidak jarang, protes sosial dalam komunikasi politik di era digital muncul dalam branda dan viralnya "*#*" (*hashtag*/tagar) yang tidak hanya muncul di konteks regional, namun juga internasional. Akhir-akhir ini muncul fenomena "perang tagar". Sebagai contoh, dalam kontestasi pemilihan presiden di Indonesia, muncul gerakan tagar "*#2019GantiPresiden*" yang gaduh dalam dunia maya dan turut mewarnai pada pesta demokrasi Indonesia (Ramadhanny, 2018)

"Banyak jalan menuju Roma," adalah pepatah yang lahir saat ekspansi Romawi. Pepatah ini dalam dengan tepat menggambarkan bagaimana fenomena protes sosial dalam komunikasi politik di era digital yang telah menemukan berbagai alternatif cara penyampaian. Dalam kajian pendidikan kewarganegaraan, hadirnya berbagai alternatif cara penyampaian terhadap realitas sosial merupakan salah satu wujud konfirmasi faktual partisipasi dalam perwujudan *smart and good citizen*. Pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana dalam membentuk warga negara yang baik dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Abdulkarim, 2007). Dalam hal partisipasi, pendidikan

kewarganegaraan menghadirkan partisipasi yang penuh dan berimbang; dengan nalar dan tanggung jawab politik dari warga negara yang taat terhadap demokrasi konstitusional Indonesia (Wahab & Sapriya, 2011)

Ada beberapa penelitian yang dapat dipertimbangkan untuk menggambarkan bagaimana dampak kemufakatan Revolusi Industri 4.0 dalam memunculkan fenomena protes sosial secara digitalisasi. Salah satunya adalah penelitian tentang terjadinya pergeseran dalam hirarki alat melegitimasi, sebuah analisis terhadap iklan yang digunakan dalam kampanye presiden Amerika 2008. Penelitian tersebut menunjukkan fitur yang melegitimasi kandungan makna iklan dan konten kampanye (Mackay RR, 2013). Selain itu, ada sebuah klaim yang menyimpulkan bahwa generasi muda kurang peduli dengan politik. Namun, hal tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya karena baru-baru ini ada gelombang demonstrasi protes yang dilakukan oleh kaum muda dengan cara demonstrasi yang berbeda (Loader, Vromen, & Xenos, 2014). Selain itu, analisis terhadap fenomena kontemporer meme dalam pemilihan presiden Amerika Serikat 2016 antara Donald Trump dan Hillary Clinton mengungkapkan bahwa meme telah menjadi alat dalam legitimasi otorisasi, evaluasi moral, rasionalisasi, dan *mythopoesis* (Ross & Rivers, 2017). Selain itu, data nasional dari Amerika Serikat menunjukkan bahwa setelah mengendalikan variabel demografis, penggunaan media *offline* dan *online* turut mengonstruksi politik (pengetahuan dan kemandirian), frekuensi diskusi politik, dan pencarian informasi melalui situs jejaring sosial (de Zúñiga, Jung, & Valenzuela, 2012)

Dalam ranah politik, komunikasi politik melalui media digital adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari pembangunan prasarana demokratisasi. Protes sosial secara digital dalam mengemas pesan politik memunculkan peran media menampung eksistensi warga negara dalam menyampaikan aspirasi, tidak terkecuali pada mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengenali protes sosial dalam komunikasi politik di era digital melalui *civic community* pada mahasiswa.

Sebagai upaya menjaga eksistensi demokrasi, *civic community* pada mahasiswa dapat menjadi model proyek dalam melakukan upaya pengkonkretan politik yang sebelumnya masih abstrak. Berdasarkan beberapa penelitian tentang persepsi dan keterlibatan politik, salah satunya survei terhadap 1202 rakyat Tiongkok yang menggunakan media sosial secara *online* yang menunjukkan bahwa penggunaan media sosial berhubungan secara signifikan dengan wacana publik dan keterlibatan masyarakat (Ye, Xu, & Zhang, 2017). Lebih lanjut, Chao, Yuan, Li, & Yao (2017) menekankan dampak persepsi ekologi Internet dan kepercayaan politik terhadap kemandirian politik warganet dengan menggunakan survei di Provinsi Jiangsu (N = 1558) pada tahun 2013 yang menghasilkan persepsi bahwa ekologi Internet berefek positif

terhadap kemajuan politik secara eksternal, namun tidak signifikan pada kemajuan politik internal.

Selain itu, persepsi warganet tentang ekologi Internet secara positif mempengaruhi kepercayaan politik mereka. Pada akhirnya, hal ini berpengaruh positif terhadap kemajuan politik internal dan eksternal. Selanjutnya, penelitian tentang Digital Storytelling (DST) berdasarkan pada orientasi dialogis untuk menguji pola pikir kritis dan reflektif anak muda menunjukkan kelompok kontrol peserta yang lebih tertutup; sementara, pada kelompok intervensi dipantau stabil (Chan, 2019). Peneliti dapat memberikan gambaran bahwa skema konstruksi *civic community* pada mahasiswa merupakan cara mengaderisasi aktor demokrasi dan mendalami protes sosial yang terjadi dalam komunikasi politik di era digital.

Penelitian Tolbert (2009) tentang komunitas sipil di kota kecil Amerika Serikat dalam persoalan kesejahteraan yang dipengaruhi oleh kapitalisme lokal menyimpulkan bahwa di era globalisasi ekonomi dan devolusi politik, strategi pembangunan ekonomi harus melibatkan pembinaan terhadap usaha mikro agar kebijakan pembangunan ekonomi bermanfaat secara luas di kota-kota kecil Amerika (Tolbert, Irwin, Lyson, & Nucci, 2009). Sementara itu, kajian *civic community* di Indonesia berkembang sebagai upaya penyatuan visi misi dalam mencapai suatu tujuan. Penelitian pada peranan *civic community* dalam komunitas "Pasukan Kresek" di Kabupaten Malang Jawa Timur menunjukkan bahwa komunitas "Pasukan Kresek" berfungsi sebagai penggerak partisipasi pemuda dengan berdasarkan orientasi lokal (Mawarti & Sundawa, 2016).

Sebagai pembanding, temuan penelitian Cheung et al (2019) yang melakukan survey pada 527 mahasiswa di Wilayah Otonom Metropolitan Hong Kong menunjukkan dampak protes melalui demonstrasi berpengaruh terhadap persetujuan dari pemerintah; namun, secara empiris belum dipetakan. Demonstrasi dan protes menunjukkan partisipasi dan keterlibatan rakyat. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk memenuhi kekecewaan rakyat. Meski begitu, perkembangan demokrasi Hong Kong berbeda dari negara-negara dunia ketiga lainnya.

Temuan penelitian lain tentang demonstrasi mahasiswa di Beijing setelah kematian Hu Yaobang menyoroti pentingnya demokrasi dan kebebasan di Tiongkok dan Hong Kong (Cheng, 1989). Dalam konteks protes di Iran, melalui kampanye Presiden Khatami pada Februari-Mei 1997, gerakan mahasiswa bangkit setelah absen selama tujuh belas tahun (Mashayekhi, 2001). Dalam perjalanan menuju kedewasaan sebuah negara, pemuda, khususnya mahasiswa, memiliki beberapa posisi strategis. Posisi tersebut antara lain, segi usia yang masih muda; segi kesempatan belajar yang luas; dan segi intelektual yang memiliki kesempatan menjadi cendekiawan serta peneliti dalam kampus. Berdasarkan beberapa posisi strategis mahasiswa tersebut, mahasiswa juga berpotensi mempunyai peran strategis dalam pencapaian cita-cita

dan tujuan sebuah bangsa dalam ranah demokrasi. *Civic community* pada mahasiswa dapat dipandang sebagai salah bentuk konfirmasi adanya keterlibatan warga negara menuju perwujudan demokrasi yang kental dengan pengharapan keterlibatan warga negara.

Civic community cenderung dimaknai sebagai sebuah penstrukturan individu ke dalam sebuah kesatuan dan dapat melakukan praktik Kewarganegaraan. Sebuah penelitian tentang keikutsertaan remaja dan anak-anak imigran Meksiko dalam komunitas menunjukkan bahwa terdapat kenaikan pengetahuan kewarganegaraan setelah anak-anak dan remaja terlibat dalam unjuk rasa dan kegiatan sukarelawan yang diselenggarakan melalui *Centro Guadalupano* (Solís et al, 2013). Temuan tersebut menegaskan bahwa kegiatan dalam komunitas dapat mengembangkan pemahaman anak dan remaja tentang keterlibatan sipil, dan meningkatkan paham mengenai partisipasi (Solís, Fernández, & Alcalá, 2013). *Civic community* adalah sebagai tonggak dalam menghimpun dan menggerakkan masalah yang berkaitan dengan praktik kewarganegaraan.

Wujud *civic community* pada mahasiswa mengkristal dalam kemasan organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada dalam kampus. Walaupun secara penyebutan terdapat berbagai istilah, namun organisasi-organisasi kemahasiswaan tersebut telah cukup mewakili adanya bentuk strukturisasi minat dan bakat mahasiswa. Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 14 ayat 2 disebutkan bahwa mengembangkan bakat dan minat mahasiswa dapat dilakukan melalui ekstrakurikuler organisasi kemahasiswaan.

Sebagai *agent of change*, mahasiswa mendapat tuntutan untuk berperan aktif dalam menghadapi dinamika yang terjadi. Perjalanan sejarah organisasi kemahasiswaan di Indonesia mengalami pasang surut bergantung pada situasi politik yang terjadi. Dalam konteks kajian media, organisasi kemahasiswaan dalam hal konten, sejarah, dan pengaruhnya membaaur dalam perkembangan teknologi. Saat ini, organisasi kemahasiswaan mulai dipertanyakan eksistensi dan esensinya. Beberapa bentuk organisasi kemahasiswaan mengalami disorientasi, terlebih lagi pada pasca reformasi. Organisasi kemahasiswaan di kampus kini hadir dalam bentuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), atau penamaan lainnya sesuai peraturan masing-masing kampus, yang secara keseluruhan merupakan perwujudan usaha memenuhi pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Pertanyaan selanjutnya, masih adakah warisan sejarah yang masih melekat pada mahasiswa di era digital kini?

Sejatinya, organisasi kemahasiswaan hadir untuk menjawab kebutuhan mahasiswa dalam mengembangkan potensinya. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, organisasi kemahasiswaan mendapat ruang untuk menjadi *civic community* yang dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungannya. Menyikapi adanya organisasi kemahasiswaan sebagai bentuk *civic community* yang

berisikan intelektual muda, maka organisasi kemahasiswaan dapat disebut sebagai artefak dalam ekologi kampus.

Guna mendapatkan pembandingan ataupun mendapatkan persamaan dan perbedaan tema penelitian protes sosial dalam komunikasi politik di era digital melalui *civic community* pada mahasiswa, peneliti menelusuri beberapa penelitian sebelumnya yang peneliti anggap relevan. Adapun beberapa penelitian yang peneliti anggap relevan antara lain tentang protes sosial dalam komunikasi politik di era digital di Rusia tahun 2011-2012. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar protes yang terjadi di Rusia dimungkinkan oleh munculnya jejaring sosial. Protes cerdas yang dikembangkan dalam menghadapi pemerintah menandakan adanya keadaan perlawanan yang sesungguhnya, sekaligus menegaskan pentingnya protes secara *online* pada politik Rusia (Denisova, 2017).

Sebuah kajian mengenai kaum muda, media sosial dan partisipasi menunjukkan bahwa media sosial merupakan alat terbaik untuk protes. Kajian ini menegaskan bahwa media sosial merupakan jembatan pembangunan jaringan demokratis warga negara, terutama kaum muda (Vesnic-Alujevic, 2013). Penelitian lainnya mengeksplor sisi jurnalis yang menulis gerakan protes sosial di Amerika Serikat dan Kanada selama tahun 1999 dan 2000. Penelitian ini membuktikan bahwa walaupun internet menuai sukses dalam komunikasi politik, namun bagi jurnalis, mobilisasi melalui *web* berdampak kurang signifikan. Lebih lanjut, penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam gerakan sosial tidak semua khalayak melek akan keberadaan internet; hal ini menjadi gambaran redupnya peran internet dalam memberdayakan demokrasi (Jha, 2008).

Rangkaian demonstrasi di jalanan Chili oleh mahasiswa pada 2011 memprotes beberapa isu seperti kualitas pendidikan dan menentang pembangunan pembangkit listrik di Patagonia. Pasca demonstrasi tersebut, dilakukan penelitian berupa survei terhadap pemuda berusia 18-29 tahun di Chili yang menunjukkan adanya hubungan positif antara penggunaan media sosial dan partisipasi yang berada dalam cangkang gerakan sosial. Survei ini juga mengungkapkan bahwa temuan tersebut dapat menjadi pengendali terhadap variabel lainnya, misalnya ideologi dan minat terhadap politik. Survei tersebut juga secara unik menganalisis peran Facebook dan Twitter dalam demonstrasi yang terjadi di jalanan (Scherman, Arriagada, & Valenzuela, 2015)

Sebuah penelitian yang meneliti hubungan Facebook, YouTube, Twitter, dan Blogs dalam protes RUU kontroversial yang dipelopori oleh Gubernur Scott Walker tahun 2011 oleh penduduk Wisconsin mengungkapkan bahwa meskipun mahasiswa menggunakan media sosial ini untuk mendapatkan informasi tentang protes perbaikan anggaran, hanya penggunaan ekspresif saja yang terkait dengan keterlibatan protes offline (MacAfee & De Simone, 2012). Penelitian ini memberikan sebuah indikasi bahwa untuk dapat berkomunikasi efektif dengan warganya, para aktor politik juga harus memperhatikan

perkembangan di dunia teknologi dan tidak terkecuali dalam media sosial.

Lebih lanjut, hasil penelitian tentang keterlibatan *civic community* dalam komunitas etnis Turki, Suriname, dan Maroko di empat kota di Belanda secara umum menunjukkan bahwa masyarakat sipil dan partisipasi politik saling terkait dan saling mendukung. Dalam penelitian ini, etnis Suriname dan Maroko berturut-turut menempati posisi kedua dan maroko ketiga dalam hal partisipasi politik (van Heelsum, 2005). Hasil lain dari penelitian sebelumnya juga memberikan gambaran bahwa di era digital, konsep kewarganegaraan digital kian melejit dengan hadirnya bentuk-bentuk baru dalam mengekspresikan aspirasi warga negara. Survei terhadap protes di Tahrir Square Mesir menemukan bahwa media sosial melalui komunikasi interpersonal dengan menggunakan Facebook dan kontak telepon dapat menggiring massa untuk hadir dalam protes (Tufekci & Wilson, 2012).

Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa warga negara mempunyai ruang baru dalam memperluas, menajamkan, dan menggiring bentuk informasi yang kemudian bermanfaat dalam aktivitas politik. Dengan berfokus pada protes sosial dalam komunikasi politik di era digital melalui *civic community* pada mahasiswa, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan ruang penelitian pada ranah pemanfaatan *civic community* pada mahasiswa sebagai lahan untuk dapat melakukan pada protes sosial dan komunikasi politik, secara khusus di era digital.

Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana protes sosial digital dalam perspektif *civic community*. Agar penelitian lebih terfokus, peneliti membagi topik tersebut ke dalam dua sub masalah, yaitu tentang bagaimana peran media sosial dalam *civic community* pada mahasiswa dan bagaimana peran media sosial dalam komunikasi politik pada mahasiswa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis (Brouwer, 1984). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk lebih leluasa dalam menangkap protes sosial dalam komunikasi politik digital. *noema* dalam penelitian ini adalah aktivitas para anggota organisasi kemahasiswaan yang tersimpul menjadi *civic community*. Sementara, *noesis* dalam penelitian ini adalah organisasi kemahasiswaan sebagai *civic community*.

Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan subjek penelitian 8 media sosial milik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang berasal dari berbagai kampus di Yogyakarta. Adapun media sosial yang diteliti dalam penelitian ini adalah 1) Instagram BEM Universitas Gadjah Mada, 2) Instagram BEM Universitas Negeri Yogyakarta, 3) Instagram BEM Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 4) Instagram BEM Universitas Atmajaya Yogyakarta, 5) Instagram BEM Universitas

Islam Indonesia Yogyakarta, 6) Instagram BEM Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 7) Instagram BEM Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, dan 8) Instagram BEM Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara terhadap pengguna media sosial (anggota BEM) serta pengamatan terhadap media sosial yang memuat konten protes sosial dan komunikasi politik digital. Pengumpulan data lainnya melalui pengumpulan dokumentasi dari jurnal, artikel hasil penelitian sebelumnya mengenai protes sosial dalam komunikasi politik digital, buku, dan dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Selama melakukan pengumpulan data, wawancara dilakukan kepada ketua BEM dengan lokasi yang berbeda sesuai dengan kesepakatan dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan wawancara yang mencakup pemanfaatan media sosial bagi BEM dalam aktivitas protes sosial dan komunikasi politik di era digital; pemanfaatan media sosial bagi BEM dalam aktivitas protes sosial dan komunikasi politik di era digital; dan kendala dan upaya yang muncul dalam aktivitas protes sosial dan komunikasi politik di era digital. Wawancara berlangsung selama 45-50 menit. Guna mendapatkan hasil wawancara yang sesuai dengan tujuan wawancara, peneliti menyiapkan peralatan berupa alat rekam dan alat tulis selama proses wawancara berlangsung.

Teknik pengumpulan data observasi yang dilakukan adalah observasi terstruktur. Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu membuat daftar aktivitas atau fenomena yang mengacu pada protes sosial dalam komunikasi politik di era digital melalui *civic community* pada mahasiswa. Kemudian, peneliti membuat format cakupan observasi sebagaimana dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Tabel Observasi

No	Aspek yang di amati	Keterangan
1.	Adanya konten media sosial BEM yang mengandung kepekaan sosial atas relitas sosial yang telah atau sedang terjadi.	
2.	Adanya konten media sosial BEM yang mengandung curah perasaan atau curah pendapat berdasarkan relitas sosial yang telah atau sedang terjadi.	
3.	Adanya konten media sosial BEM yang mengandung menerima atau menolak realitas sosial yang telah atau sedang terjadi.	
4.	Adanya konten media sosial BEM yang mengandung respon dengan tidak terbatas pada perorangan	
5.	Adanya konten media sosial BEM yang mengandung pernyataan sikap terhadap relitas sosial yang telah atau sedang terjadi.	

Selama proses observasi, peneliti mencatat, mengamati, dan memperhatikan media sosial delapan kampus yang telah ditetapkan sebagai objek penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama penelitian berlangsung. Data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian direduksi dan ditampilkan dalam gambaran secara keseluruhan. Hasil tersebut kemudian disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah.

Dalam penelitian ini dilakukan reduksi data secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Dalam proses reduksi data, peneliti melakukan pemilihan dan penyederhanaan terhadap temuan di lapangan. Proses reduksi data bermanfaat dalam menajamkan temuan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam proses reduksi data, peneliti berusaha menyederhanakan abstrak dari temuan dengan mengacu pada reduksi data Miles & Huberman (1992). Berdasarkan perolehan data lapangan mengenai protes sosial dalam komunikasi politik di era digital melalui *civic community* pada mahasiswa, peneliti melakukan pemilihan terhadap muatan protes sosial dan komunikasi politik melalui *civic community* pada mahasiswa. Setelah itu, peneliti melakukan penyederhanaan sesuai dengan tujuan penelitian.

Karena penyajian data mengacu pada Miles & Huberman (1992) yang memberikan batasan penyajian data sebagai kumpulan informasi yang tersusun untuk kemudian dapat di tarik sebagai kesimpulan, maka peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian agar mudah dipahami oleh pembaca. Penelitian ini juga menyajikan data mengenai protes sosial dalam komunikasi politik di era digital melalui *civic community* pada mahasiswa dengan cara menyusun informasi yang relevan agar dapat membuat kesimpulan dengan makna yang valid.

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini juga tidak lepas dari pendapat Miles dan Huberman bahwa penarikan kesimpulan merupakan kegiatan dari suatu konfigurasi yang utuh (Miles & Huberman, 2012). Peneliti melakukan verifikasi dengan meninjau ulang catatan dari lapangan dan temuan lainnya selama penelitian berlangsung. Secara singkat pada tahap penarikan kesimpulan. Peneliti berupaya melakukan pengkodean dan pencocokan sebagai upaya validitas; sehingga, kesimpulan akhir dapat dipertanggungjawabkan. Adapun proses pengkodean data kualitatif secara manual adalah sesuai kebutuhan, seperti yang ditegaskan oleh Saldana dalam Hashimov (2015).

TEMUAN DAN DISKUSI

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, diskusi penelitian membandingkan teori yang sudah ada dengan temuan di lapangan. Secara umum, penelitian ini melihat bagaimana peran media sosial dalam *civic community* pada mahasiswa dan bagaimana peran media

sosial dalam komunikasi politik pada mahasiswa. Guna menjaga kerahasiaan dan etika penelitian, maka narasumber dalam penelitian akan disebutkan inisialnya saja. Selanjutnya, untuk memudahkan pemahaman hasil penelitian, diskusi dibagi ke dalam beberapa unit-unit pembahasan.

Peran media sosial dalam *civic community* pada mahasiswa

Dalam kajian pendidikan kewarganegaraan, hasil dari kolaborasi antara *civic community* dan *civic engagement* terwujud dalam berbagai rakitan substansi yang dapat memperkaya khazanah keilmuan pendidikan kewarganegaraan. Namun, belum ada pengertian yang tepat mengenai *civic community* dan dapat menggambarkan penyampaian pesan dari *civic community*. Meski begitu, dalam *Campus Compact*, Boston terdapat program percontohan di Rutger's University yang dapat membantu siswa mendapatkan pengalam belajar holistik yang dikemas dalam layanan masyarakat dengan unit kerja menyerupai *civic community*, yaitu *community service* dan *group projects* (Campus Compact, 2001).

Perkumpulan mahasiswa dalam kampus yang terkemas dalam berbagai nama sejatinya merupakan wujud dari *civic community* yang ada dalam institusi perguruan tinggi. Secara general, wujud *civic community* yang berisikan kumpulan antar Perguruan Tinggi yang melakukan kolaborasi adalah bentuk pertukaran pengetahuan dan hubungan timbal balik (Carnegie Foundation, 2014). Sementara, level *civic community* yang berisikan kumpulan mahasiswa merupakan proses bersatunya individu dalam kampus yang memiliki keinginan dan tujuan yang serupa atau sama. Dalam teori organisasi, organisasi didefinisikan sebagai suatu kesatuan sosial yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang sama (Robbin, 1996).

Civic community pada mahasiswa yang dipayungi oleh organisasi kemahasiswaan merupakan bentuk tanggung jawab mahasiswa sebagai generasi muda berilmu yang disebut sebagai *agent of change* dan *iron stock* (Amri & Hendrastomo, 2016). *Civic community* pada mahasiswa terjadi dalam skema perpaduan antara relitas sosial dan keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan. Secara umum, posisi politik mahasiswa dalam memicu gejolak politik dalam telah menorehkan berbagai fenomena di seluruh dunia. Dalam skala internasional, banyak pengamat menekankan aktivisme mahasiswa di Berlin dan Paris dimulai dari peristiwa Berkeley. Kejadian tersebut meneguhkan bahwa pergerakan mahasiswa dapat memicu pergolakan yang revolusioner (Altbach, 1970). Sementara itu, dalam hal keyakinan politik, hasil survei mengenai keyakinan politik pada 1.440 mahasiswa di 16 perguruan tinggi dan universitas di Amerika menunjukkan bahwa sekitar dua perlima responden memiliki keyakinan politik terbalik dari orang tua mereka (Middleton & Putney, 1963).

Hasil wawancara pada mahasiswa yang berasal dari Jurusan Manajemen di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta menyatakan

bahwa fungsi media sosial dalam aktivitas BEM adalah sebagai wadah publikasi aktivitas sekaligus sebagai wadah publikasi terhadap fenomena sosial

- Pewawancara : Apakah BEM Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta menggunakan media sosial dalam aktivitasnya?
- RADP : "...media sosial bagi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta merupakan alat dalam menjangkau perhatian mahasiswa terhadap aktivitas kami di BEM, selain itu juga jika ada *event-event* tertentu kami publikasikan di media sosial..." (RADP, 2019)

Sementara itu, JR, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta menanggapi, "... media sosial berfungsi sebagai alat komunikasi dan alat dalam memperkenalkan BEM pada khalayak..." (JR, 2019)

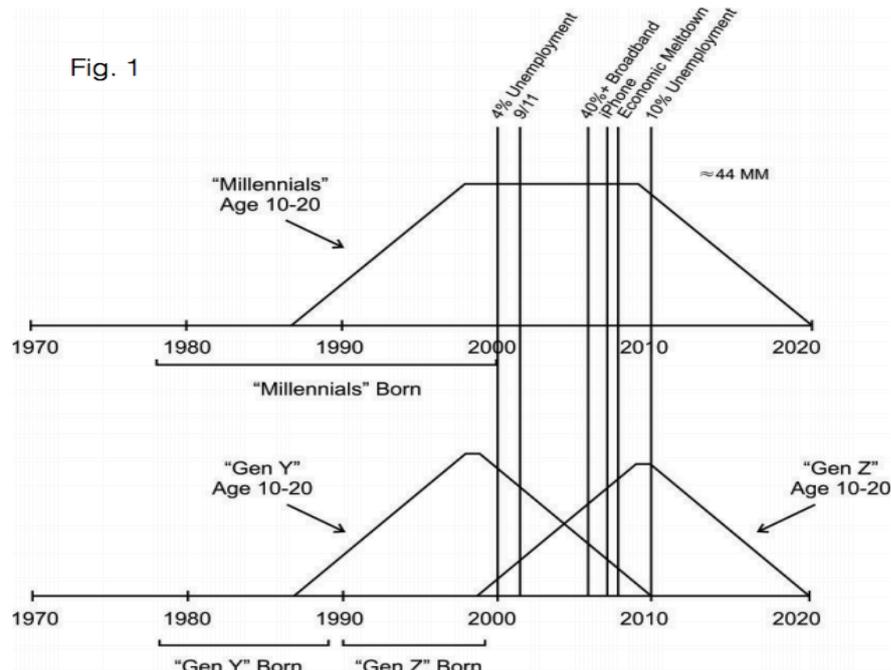
Media sosial mempunyai peran sebagai sarana bagi BEM untuk bersosialisasi dan menangkap relitas sosial, yang kemudian dapat menjadi konten dalam media sosial. ASPS, mahasiswa Jurusan Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta mengungkapkan, "... dalam BEM Universitas Sanata Darma Yogyakarta media sosial merupakan perangkat dalam bersosialisasi terhadap mahasiswa di luar BEM ..." (ASPS, 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa BEM menggunakan media sosial sebagai wadah yang dapat mendekatkan mereka ke mahasiswa atau subjek diluar BEM. Media sosial merupakan alat berbasis internet yang memungkinkan individu untuk berkumpul dan berbagi konten yang dapat menumbuhkan ide dan gagasan (Ventola, 2014). Dengan demikian, maka pemanfaatan media sosial bagi *civic community* pada mahasiswa adalah sebagai instrumen publikasi aktivitas, bersosialisasi, dan protes sosial.

Berdasarkan temuan lapangan melalui observasi, dalam penggunaan media sosial, BEM juga mempertimbangkan efektivitas penyampaian informasi. Media sosial berbasis internet memungkinkan komunikasi antar ribuan orang (Mangold & Faulds, 2009). Selain itu, penggunaan media sosial juga merupakan bentuk respon terhadap perubahan zaman yang terjadi. Media sosial memberikan cara baru bagi publik untuk menerima informasi (Rutsaert et al., 2013).

Peran media sosial dalam *civic community* mahasiswa juga tidak lepas dari komposisi para anggota BEM saat ini yang juga merupakan bagian dari generasi yang dekat dengan teknologi. Para anggota BEM kini adalah termasuk dalam generasi Z, yaitu generasi yang lahir tahun 1990an. Dengan begitu, usia mereka saat ini berkisar 16 hingga 23 tahun (Tulgan, 2013). Dalam perekonomian, gambaran generasi Z ada dalam gambar 1 berikut.

Gambar 1. Gambaran Generasi



Sumber: (Tulgan, 2013)

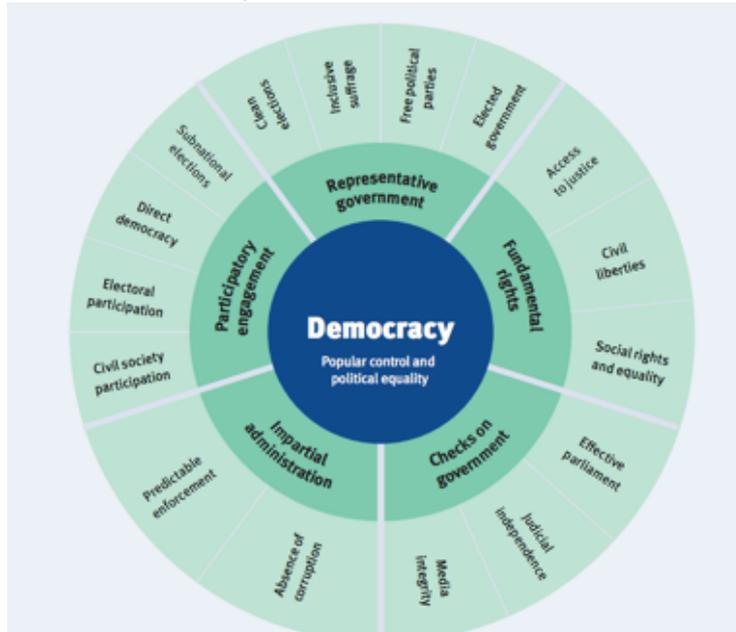
Generasi Z adalah generasi yang sejak lahir sudah akrab dengan teknologi yang canggih (Ardina, 2017). Generasi Z dikenal sebagai generasi *native digital* (Jain, Vatsa; Reshma, & Jagami, 2014), Dalam lingkaran generasi Z, fenomena yang umum penggunaan media sosial (O’Keeffe et al., 2011). Peran media sosial dalam *civic community* pada mahasiswa secara umum adalah sebagai sarana interaksi yang lebih efektif antar anggota.

Peran media sosial dalam komunikasi politik

Terdapat berbagai pandangan mengenai peran media sosial dalam komunikasi politik. Sebuah penelitian mengenai demokrasi deliberatif di era digital menunjukkan kehadiran media digital sebagai sarana baru dalam menyampaikan kebijakan pemerintah agar terjadi keselarasan antara harapan dan kebutuhan (Saepudin, Suryadi, & Malihah, 2018). Konsep jejaring sosial merupakan konsep sosiologis, bukan teknologi (Buzzetto-More, 2012). Berpautan dengan dengan hal tersebut, maka dalam komunikasi politik, media sosial memiliki posisi diplomatis dalam alat penyampaian iktikad politik.

Peran media sosial dalam komunikasi politik era digital di negara demokrasi tidak lepas dari negara demokrasi yang dimengerti sebagai wujud kesepakatan guna mengontrol kepadanan kepentingan dalam keputusan. Cita-cita demokrasi merupakan penjaminan kesetaraan dan kebebasan yang mendasar (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2017). Untuk memahami diskursus demokrasi secara global, berikut adalah gambaran *conceptual framework the global state of democracy*.

Gambar 2. Conceptual framework: The Global State of



Sumber: Democracy (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2017)

Peran media sosial dalam komunikasi politik di tren global demokrasi menjadi cara baru dalam memahami wujud keikutsertaan individu sebagai warga negara di internet (*netizen*) untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Dalam skema *cyberspace*, warga negara adalah publik yang bebas menyampaikan pendapat mereka (Saepudin et al., 2018)

Salah satu kutipan wawancara mengenai peran media sosial dalam komunikasi politik di *civic community* pada mahasiswa menyebutkan:

Pewawancara : Apakah media sosial juga digunakan dalam menampung aspirasi dalam BEM?

IAP: "... Media sosial digunakan dalam menampung aspirasi adalah yang menjadi kebutuhan dari mahasiswa tersebut ..." (IAP, 2019)

Serupa dengan IAP, LA, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan menyampaikan pendapat bahwa peran media sosial dalam komunikasi politik adalah sebagai tempat publikasi dan penyebaran informasi, "...Peran media sosial adalah mempublikasikan aktivitas dan problem yang terjadi..." (LA, 2019). Sementara, mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta yang terlibat dalam BEM menyatakan, "...di BEM Universitas Atmajaya Yogyakarta peran media sosial lebih condong pada informasi bagi mahasiswa mengenai event BEM, misalnya pemilu atau kegiatan lainnya..." (SAS, 2019) Dalam hasil wawancara lainnya mengenai peran media sosial dalam komunikasi politik, OTK, mahasiswa Jurusan Komunikasi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta memberikan tanggapan berikut, "...di BEM Universitas Gadjah Mada Yogyakarta peran media sosial adalah sebagai media

dalam membentuk komunikasi dua arah sehingga masukan dan kritis dari audience akan kami dapatkan..." (OTK, 2019).

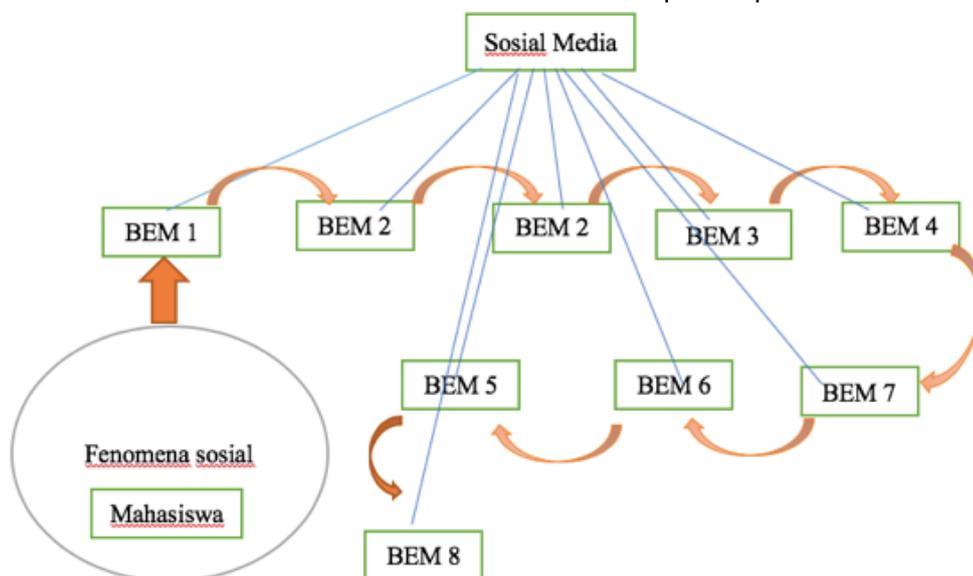
Dalam komunikasi politik era digital, media sosial menawarkan sarana *branding* (Anshari, 2013). Tawaran ini proporsional dengan hasil penelitian yang tengah berkembang mengenai media sosial dalam komunikasi politik era digital. Antara lain, pada penelitian mengenai cara televisi mengubah lanskap politik yang menyimpulkan bahwa hubungan televisi dan politik tahun 1960-an masih berlaku hingga batas tertentu; namun menghadapi tantangan, yaitu melemahnya keunggulan model komunikasi politik yang bermodel siaran (Gurevitch, Coleman, & Blumler, 2009).

Penelitian lain mempelajari aktivitas komunikasi digital gerakan anti-kapitalis Amerika, *Occupy Wall Street*. Melalui Twitter, gerakan *Occupy Wall Street* mendapatkan partisipasi dari pengguna lain yang mempunyai minat yang sama, dalam hal ini politik domestik dan gerakan sosial asing. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa partisipasi tersebut berkurang seiring berjalannya waktu (Conover, Ferrara, Menczer, & Flammini, 2013). Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas politik melalui media sosial di era digital merupakan satu kesatuan.

Hasil wawancara dengan SI, seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri "Sunan Kalijaga" Yogyakarta, mengenai media sosial dalam komunikasi politik era digital mengungkapkan bahwa, "...media sosial dalam komunikasi politik era digital menurut saya menjadi alat yang dapat menjadi perantara dalam berpartisipasi..." (SI, 2019)

Penelitian menunjukkan peran model media sosial dalam komunikasi politik pada mahasiswa, yang dapat dilihat gambar 3:

Gambar 3. Peran media sosial dalam komunikasi politik pada mahasiswa



Sumber: Data Penelitian

Berdasarkan gambar 3, dapat dipahami bahwa peran media sosial dalam komunikasi politik pada mahasiswa terjadi berkesinambungan antara satu BEM dengan lainnya. Hal yang membedakan adalah, di era digital, media sosial mempunyai fungsi sebagai jangkar sorong yang dapat menyatukan dan meluaskan berita. Namun, secara substansif, pesan politik dapat ditangkap masing-masing BEM. Pesan politik yang menjadi kajian dalam sosial media BEM merupakan respon dan pernyataan sikap dari fenomena tersebut.

Pada gambar 3 diketahui juga bahwa pola penyebaran informasi secara sporadis telah terjadi. Adanya platform media sosial dalam komunitas mahasiswa menjadikan proses penyebaran informasi dapat terjadi secara cepat. Temuan ini didukung oleh temuan penelitian sebelumnya yang meneliti penggunaan Teknologi Komunikasi Informasi (TIK) terhadap pola partisipasi politik ekspresif di Kolombia. Temuan penelitian tersebut mengungkap bahwa penggunaan TIK secara signifikan dapat membentuk perilaku partisipasi politik tradisional melalui upaya mobilisasi. Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa TIK menawarkan jasa dalam keterlibatan keterlibatan politik yang demokratis bagi masyarakat (Rojas & Puig-I-Abril, 2009).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar terdapat dua peran media sosial dalam komunikasi politik pada mahasiswa, yaitu peran positif dan negatif. Dalam politik, selain membantu *campaign* secara efektif, adanya media sosial juga dapat membantu khalayak dalam mengenal aktor politik. Peran media sosial dalam komunikasi politik pada mahasiswa secara positif antara lain adalah memperluas target, mendapatkan *feedback*, dan penghematan sarana publikasi. Sementara, peran media sosial dalam komunikasi politik pada mahasiswa secara negatif adalah rawan penyebaran berita yang tidak benar, berita palsu, dan terjadi penyadapan.

Implikasi

Mendalami organisasi kemahasiswaan adalah upaya dalam memahami praktik kewarganegaraan yang berkaitan dengan menggunakan kajian komunikasi dan studi media sebagai pisau analisis. Penelitian ini adalah upaya paparan esai analisis yang menyampaikan sintesis pemikiran penulis. Peneliti berupaya membandingkan gerakan mahasiswa Indonesia dengan gerakan mahasiswa di Hongkong atau Arab-Spring sudah disinggung sebelumnya pada pengantar.

Arab-Spring dimulai dari penggulingan presiden Tunisia, yang kemudian berlanjut kepemimpinan Arab lainnya yaitu presiden Mesir, Libya, dan Yaman. Menarik benang merah dari Arab-Spring, apa yang terjadi di Indonesia belum sampai kearah negatif (penggulingan presiden). Walaupun demikian, terdapat resistensi terhadap suatu kelompok dalam aksi unjuk rasa yang terjadi di Indonesia; dengan peran media massasebagai penentu perkembangan aksi massa tersebut.

Pada sisi lain, aksi unjuk rasa yang terjadi di Hongkong menjadi pelajaran bagi negara demokrasi seperti Indonesia untuk tidak

mempersulit ruang penyampaian aspirasi. Belajar dari yang terjadi di Hongkong, aksi unjuk rasa yang menggunakan pendekatan *online* dan *offline* dapat mempercepat penyampaian informasi pada khalayak. Dengan demikian, maka, wajar saja jika (TIK) menjadi "pelayan" dalam keterlibatan politik yang demokratis bagi masyarakat seperti yang telah di sampaikan oleh Rojas & Puig-i-Abril (2009) sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan diskusi hasil, disimpulkan bahwa era digital telah membawa dampak dalam setiap kehidupan manusia. Dalam hal protes sosial dalam komunikasi politik di era digital melalui *civic community* pada mahasiswa, terjadi beberapa situasi yang dapat membuktikan bahwa *civic community* perlu dijadikan bahan pertimbangan guna mewujudkan warga negara yang baik. *Civic community* pada mahasiswa ada dalam BEM, sehingga mahasiswa yang terlibat dalam BEM sudah terbiasa dengan fungsinya sebagai komunitas. Peran media sosial dalam komunikasi politik pada mahasiswa adalah sebagai alat untuk mempublikasikan aktivitas dalam BEM dan sebagai wadah untuk menginformasikan fenomena yang terjadi.

Bagi penelitian selanjutnya dalam kajian komunikasi dan studi media, peneliti memberikan rekomendasi secara khusus, yaitu dengan menggali lebih jauh organisasi kemahasiswaan dan komunikasi organisasi kemahasiswaan; dan mengaitkannya pada demokrasi dalam kampus guna menjawab ambiguitas organisasi kemahasiswaan dan mengembalikan peran organisasi kemahasiswaan. Alasan yang mendasari saran bagi penelitian lanjutan dalam kajian ini adalah agar organisasi kemahasiswaan tidak melupakan literasi dalam menjalankan roda organisasi kemahasiswaan dan tidak terjebak dengan menjadi *event organizer*.

PERNYATAAN

Hasil penelitian ini merupakan bagian dari hasil disertasi yang di lakukan peneliti di Departemen Doktoral Pendidikan Kewarganegaraan Univerisitas Pendidikan Indonesia Bandung guna memperoleh gelar Doktor pada bidang Pendidikan Kewarganegaraan.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Univesitas Gadjah Mada Yogyakarta, Univesitas Negeri Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian kepada peneliti. Peneliti juga menyampaikan terimakasih kepada semua anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang telah bersedia diwawancarai.

REFERENSI

- Abdulkarim, A. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan membangun warga negara yang demokratis untuk kelas VII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah*. Jakarta: Grafindo Media Pratama.
- Altbach, P. G. (1970). The international student movement. *Journal of Contemporary History*, 5(1), 156–174. <https://doi.org/10.1177/002200947000500111>
- Amri, R., & Hendrastomo, G. (2016). Dinamika gerakan kritis mahasiswa universitas negeri. *E-Societas*, 5(1), 1–11. Retrieved from <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/societas/article/view/3779/0>
- Anshari, F. (2013). Komunikasi politik di era media sosial. *Jurnal Komunikasi*, 8(1).
- Ardina, I. (2017). Mengenal generasi Z. *Beritagar.Id*.
- Bennett, W. L. (2008). *Civic life online: Learning how digital media can engage youth* (John D. and Catherine T. MacArthur Foundation series on digital media and learning) (pp. 1–24). pp. 1–24. <https://doi.org/10.1162/dmal.9780262524827.001>
- Buzzetto-More, N. (2012). Understanding social media. In *Transformation in Teaching: Social Media Strategies in Higher Education*. Santa Rosa: CA, Informing Science Press.
- Campus Compact. (2001). *The civic community: Theory and practice*. Boston.
- Carnegie Foundation. (2014). Carnegie classification on community engagement. Retrieved from classifications.carnegiefoundation.org/descriptions/community_engagement.php website: classifications.carnegiefoundation.org/descriptions/community_engagement.php
- Chan, C. (2019). Using digital storytelling to facilitate critical thinking disposition in youth civic engagement: A randomized control trial. *Children and Youth Services Review*, 107. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.104522>
- Chao, N., Yuan, G., Li, Y., & Yao, Q. (2017). The internet ecological perception, political trust and political efficacy of Chinese netizens. *Telematics and Informatics*, 34(3), 715–725. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2016.05.014>
- Cheng, J. Y. S. (1989). The democracy movement in Hong Kong. *International Affairs*, 65(3), 443–462. <https://doi.org/10.2307/2621722>
- Cheung, C. kiu, Ma, S. K., & Chan, C. K. chi. (2019). Linking participation in occupying protest, civic engagement, and approval of government among college students in Hong Kong. *Social Science Journal*. <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2019.03.006>
- Conover, M. D., Ferrara, E., Menczer, F., & Flammini, A. (2013). The digital evolution of Occupy Wall Street. *PLoS ONE*, 8(5). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0064679>
- de Zúñiga, H. G., Jung, N., & Valenzuela, S. (2012). Social media use for news and individuals' social capital, civic engagement and political participation. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 17(3), 319–336. <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2012.01574.x>
- Denisova, A. (2017). Democracy, protest and public sphere in Russia after the 2011–2012 anti-government protests: digital media at stake. *Media, Culture and Society*, 39(7), 976–994. <https://doi.org/10.1177/0163443716682075>
- Gurevitch, M., Coleman, S., & Blumler, J. G. (2009). Political communication -old and new media relationships. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 625(1), 164–181. <https://doi.org/10.1177/0002716209339345>
- Hashimov, E. (2015). Qualitative data analysis: A methods sourcebook and the coding manual for qualitative researchers. *Technical Communication Quarterly*, 24(1), 109–112. <https://doi.org/10.1080/10572252.2015.975966>
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance. (2017). *First edition the global state of democracy*. Strömsborg: International IDEA.
- Jain, V., Vatsa; Reshma, & Jagami, K. (2014). Exploring generation Z's purchase behavior towards luxury apparel: A conceptual framework. *Romanian Journal of*

- Marketing*, 2(2), 18–29.
- Jha, S. (2008). Why they wouldn't cite from sites: A study of journalists' perceptions of social movement web sites and the impact on their coverage of social protest. *Journalism*, 9(6), 711–732. <https://doi.org/10.1177/1464884908096242>
- Loader, B. D., Vromen, A., & Xenos, M. A. (2014). The networked young citizen: social media, political participation and civic engagement. *Information Communication and Society*, Vol. 17, pp. 143–150. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2013.871571>
- MacAfee, T., & De Simone, J. J. (2012). Killing the bill online? Pathways to young people's protest engagement via social media. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 15(11), 579–584. <https://doi.org/10.1089/cyber.2012.0153>
- Mackay RR. (2013). Multimodal legitimation: Looking and listening to Obama's ads. In *Analyzing Genres in Political Communication* (pp. 345–378). Amsterdam: John Benjamins.
- Mangold, W. G., & Faulds, D. J. (2009). Social media: The new hybrid element of the promotion mix. *Business Horizons*, 52(4), 357–365. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.03.002>
- Mashayekhi, M. (2001). The revival of the student movement in post-revolutionary Iran. *International Journal of Politics, Culture and Society*, 15(2), 283–313. <https://doi.org/10.1023/A:1012977219524>
- Mawarti, R. A., & Sundawa, D. (2016). Peranan civic community dalam mendorong pemuda sebagai pelopor kemandirian bangsa (Studi kasus pada komunitas "Pasukan Kresek" di Kabupaten Malang Jawa Timur). *Nurani*, 16(2), 63–84. <https://doi.org/10.19109/nurani.v16i2.934>
- Middleton, R., & Putney, S. (1963). Student rebellion against parental political beliefs. *Social Forces*, 41(4), 377–383. <https://doi.org/10.2307/2573283>
- Miles, M. B., & Huberman, M. A. (2012). Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru. In *UI Press*. Jakarta: UIP.
- O'Keefe, G. S., Clarke-Pearson, K., Mulligan, D. A., Altmann, T. R., Brown, A., Christakis, D. A., ... Nelson, K. G. (2011). Clinical report - The impact of social media on children, adolescents, and families. *Pediatrics*, Vol. 127, pp. 800–804. <https://doi.org/10.1542/peds.2011-0054>
- Prabowo, T. L., & Irwansyah, I. (2018). Media komunikasi digital PolisiKu: Pelayanan publik Polri kepada masyarakat. *Jurnal Studi Komunikasi*, 2(3), 382. <https://doi.org/10.25139/jsk.v2i3.1174>
- Ramadhanny, F. (2018). Mencermati kampanye "2019 Ganti Presiden." Retrieved from www.detik.com website: <https://news.detik.com/kolom/3961188/mencermati-kampanye-2019-ganti-presiden>
- Robbin, S. P. (1996). *Teori organisasi, struktur, desain dan aplikasi*. Jakarta: Arcan.
- Rojas, H., & Puig-I-Abril, E. (2009). Mobilizers mobilized: Information, expression, mobilization and participation in the digital age. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 14(4), 902–927. <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2009.01475.x>
- Ross, A. S., & Rivers, D. J. (2017). Digital cultures of political participation: Internet memes and the discursive delegitimization of the 2016 U.S Presidential candidates. *Discourse, Context and Media*, 16, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.dcm.2017.01.001>
- Rutsaert, P., Regan, Á., Pieniak, Z., McConnon, Á., Moss, A., Wall, P., & Verbeke, W. (2013). The use of social media in food risk and benefit communication. *Trends in Food Science and Technology*, Vol. 30, pp. 84–91. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2012.10.006>
- Saepudin, E., Suryadi, K., & Malihah, E. (2018). Deliberative democracy in digital era. *International Journal of Scientific & Engineering Research*, 9(4), 859–863. <https://doi.org/10.14299/ijser.2018.04.02>
- Scherman, A., Arriagada, A., & Valenzuela, S. (2015). Student and environmental protests in Chile: The role of social media. *Politics*, 35(2), 151–171. <https://doi.org/10.1111/1467-9256.12072>

- Solís, J., Fernández, J. S., & Alcalá, L. (2013). Mexican immigrant children and youth's contributions to a community centro: Exploring civic engagement and Citizen constructions. *Sociological Studies of Children and Youth*, 16, 177–200. [https://doi.org/10.1108/S1537-4661\(2013\)0000016012](https://doi.org/10.1108/S1537-4661(2013)0000016012)
- Tolbert, C. M., Irwin, M. D., Lyson, T. A., & Nucci, A. R. (2009). Civic community in small-town America: How civic welfare is influenced by local capitalism and civic engagement*. *Rural Sociology*, 67(1), 90–113. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2002.tb00095.x>
- Tufekci, Z., & Wilson, C. (2012). Social media and the decision to participate in political protest: Observations from Tahrir Square. *Journal of Communication*, 62(2), 363–379. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2012.01629.x>
- Tulgan, B. (2013). Meet generation Z: The second generation within the giant "Millennial" cohort. *RainmakerThinking, Inc.*, 1–13. Retrieved from <http://rainmakerthinking.com/assets/uploads/2013/10/Gen-Z-Whitepaper.pdf>
- Umar, A. R. M., Darmawan, A. B., Sufa, F. S., & Ndadari, G. L. (2016). Media sosial dan revolusi politik: memahami kembali fenomena "Arab Spring" dalam perspektif ruang publik transnasional. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18(2), 114. <https://doi.org/10.22146/jsp.13130>
- van Heelsum, A. (2005). Political participation and civic community of ethnic minorities in four cities in the Netherlands. *Politics*, 25(1), 19–30. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9256.2005.00225.x>
- Ventola, C. L. (2014). Social media and health care professionals: Benefits, risks, and best practices. *P and T*, 39(7), 491–520.
- Vesnic-Alujevic, L. (2013). Young people, social media and engagement. *European View*, 12(2), 255–261. <https://doi.org/10.1007/s12290-013-0282-2>
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan landasan pendidikan kewarganegaraan*. Bandung: CVAlfabeta.
- Ye, Y., Xu, P., & Zhang, M. (2017). Social media, public discourse and civic engagement in modern China. *Telematics and Informatics*, 34(3), 705–714. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2016.05.021>